Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol. 20 No. 1, Februari 2020: 17–31
www.jab.fe.uns.ac.id

PENGUJIAN STRUKTURAL PADA KOMITMEN MANAJEMEN, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH

DEKENG SETYO BUDIARTO (dekengsb@upy.ac.id)
DEVI DAMAYANTI

Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

A B S T R A C T

Accountability and transparency of government agencies are an essential part to creating good governance. This research was conducted to determine the effect of management commitment and legislative mandate (regulation) on accountability and transparency in government agencies (SKPD) regency/city in the special region of Yogyakarta. This research is a quantitative study with the population are covering all government organization employees in Yogyakarta. The sampling technique is using a purposive sampling method with specific criteria. The hypothesis was testing using SEM-PLS. Analysis of research data involved 120 officials of all SKPD in Yogyakarta. The study shows that commitment to management has a significant effect on accountability and transparency. Regulation has a significant effect on transparency but does not affect the accountability of government agencies.
Keywords: *commitment of management, legislative mandate, transparency, accountability*

Akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah merupakan bagian yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang apik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen dan mandat legislatif (regulasi) terhadap akuntabilitas dan transparansi pada SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan populasi penelitian meliputi seluruh pejabat SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Hipotesis diuji menggunakan SEM-PLS. Penelitian melibatkan 120 pejabat SKPD kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi. Regulasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas.
Kata kunci: komitmen manajemen, mandat legislatif, transparansi, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Kedaulatan suatu daerah di Indonesia mengakibatkan munculnya minat masyarakat yang melonjak tinggi terkait dengan meningkatnya permohonan tata kelola pemerintahan yang apik (*good government*). Otonomi daerah yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu bagian dari *good governance* dengan sasaran agar kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara optimal melalui pemberdayaan potensi yang ada (Wahyuni, 2015). Dalam perudang-undangan terdapat peraturan pemerintah daerah yang telah menyerahkan hak, wewenang, dan kewajiban pada setiap daerah otonom untuk mengatur serta mengurus operasional organisasinya secara mandiri begitu juga dengan kepentingan masyarakat (Noprizal, Rusli Tanjung, & Hariyani, 2017; Sukmawati & Nurfitriani, 2019). Transparasi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting bagi pemerintah untuk mewujudkan *good governance* (Susanto, Anggraeni & Rachmawati, 2015; Budiarto & Indarti, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah masih menjadi salah satu persoalan yang diperbincangkan dan dipertanyakan oleh publik karena sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang terbilang rendah (Akbar, Pilcher & Perrin, 2012; Ritonga & Syahrir, 2017; Ridha & Basuki, 2012). Oleh karena itu, sebagai ben-

tuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pembaharuan birokrasi maupun pembaharuan di bidang tata kelola secara finansial, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat terhadap keberhasilan pelaksanaan program maupun kegiatan.

Pemerintah disebut memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) jika seluruh aktivitasnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keterbukaan/kebebasan seluruh masyarakat luas mencakup informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemerintah daerah baik dari segi keuangan, program, maupun pengambilan keputusan yang disebut sebagai transparansi. Terbentuknya transparansi didasar-kan pada kebebasan dalam mencapai informasi yang dibutuhkan secara langsung bagi setiap individu yang berkaitan dengan kepentingan publik (Pratolo, 2008). Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban baik secara finansial maupun ketaatan pada peraturan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Akbar, 2018; Hermansyah *et al.*, 2018). Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan bentuk perwujudan dari pertanggungjawaban atas pengendalian sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan organisasi (Masyhur, Haerdi & Silfi, 2011).

Realita yang selama ini terjadi terkait transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah masih memberikan hasil yang bersifat semu, relatif bias dan masih dipertanyakan (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Kecenderungan instansi pemerintah dalam memberikan laporan kinerja lebih menutupi program yang tidak tercapai dan menyajikan laporan kinerja yang sudah sesuai secara berlebihan. Laporan yang dipublikasikan selanjutnya dapat memberikan informasi yang menyesatkan publik sehingga dapat mengakibatkan pandangan publik kepada instansi pemerintah berlebihan (Ahyaruddin & Akbar, 2016).

Upaya pemerintah dalam menghasilkan pemerintahan yang 'bersih' sebagai upaya untuk memenuhi kehendak masyarakat luas atas akuntabilitas dan transparansi diimplementasikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai *output*-nya ialah LAKIP (Yusrianti & Safitri, 2015). Namun, organisasi pemerintah melaporkan LAKIP sebagai pelaporan akuntabilitas kinerja hanya sekedar formalitas untuk memenuhi ketetapan regulasi agar memperoleh dukungan kuat baik dari segi politik maupun legitimasi (Ahyaruddin & Akbar, 2017).

Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam organisasi diperlukan komitmen seluruh anggota termasuk pimpinan atau manajemen (Sihaloho & Supriono, 2013). Komitmen manajemen adalah keterikatan emosional dan bentuk kesetiaan oleh para anggota organisasi. Komitmen manajemen sangat penting bagi organisasi karena adanya keterlibatan anggota dalam memberikan perhatian, ide, dan tanggung jawab untuk mencapai visi, misi, dan *value* organisasi. Komitmen manajemen memiliki dampak positif pada akuntabilitas baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah (Akbar *et al.*, 2012; Primarisanti & Akbar, 2015). Semakin tinggi komitmen manajemen dalam mematuhi serta menjalankan peraturan dan prosedur yang telah ditentukan oleh setiap organisasi maka keterbukaan pelaporan keuangan akan semakin nyata (Noprizal *et al.*, 2017). Pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi melalui UU Keterbukaan Informasi Publik agar tercipta transparansi informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah (Nurdiansyah, 2016).

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena Pertama, pelaporan akuntabilitas yang dibuat hanya sekedar formalitas yang digunakan untuk memenuhi peraturan pemerintah serta terjadi kinerja yang semu (Nurkhamid, 2008). Kedua, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bersifat kompleks dan bervariasi, sehingga menjadi sulit diukur dan masih diperdebatkan

(Demirag & Khadaroo, 2011). Ketiga, Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang tumpang tindih dan bahkan menimbulkan polemik antara aturan yang satu dengan lainnya (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Keempat, Penelitian yang menghubungkan antara komitmen transparansi dengan akuntabilitas secara struktural masih belum banyak dilakukan.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) karena berdasarkan temuan penelitian sebelumnya Ahyaruddin & Akbar (2017) tingkat akuntabilitas di DIY tidak menunjukkan arah kinerja yang efisien. Selain itu penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya Noprizal *et al.* (2017); Pramita & Khikmah (2016); Ridha & Basuki (2012); Sihaloho & Supriono, (2013) yang meneliti pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi. Penelitian lain Ahyaruddin & Akbar (2018); Ahyaruddin & Akbar (2017) mencoba menghubungkan antara komitmen manajemen dengan akuntabilitas sementara Pratolo (2008) menguji hubungan antara transparansi dengan akuntabilitas. Penelitian ini mengembangkan hasil-hasil riset sebelumnya dengan menguji hubungan masing-masing variabel secara struktural untuk melihat pengaruh langsung secara simultan.

Selanjutnya penelitian ini terbagi dalam empat bagian, bagian pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori dan hipotesis. Pada bagian ketiga dan keempat adalah metode penelitian dan hasil dan pembahasan. Pada bagian akhir penelitian adalah kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Institusional

Teori institusional memiliki gagasan yang menjelaskan tentang struktur organisasi yang selaras dengan kaidah/kode etik dan kebiasaan yang selanjutnya menuju ke arah legitimasi serta *support* dari organisasi eksternal (Ahyaruddin & Akbar, 2016). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi memiliki kecenderungan ke arah homogenisasi, walaupun pada mulanya mereka menunjukkan sebuah keanekaragaman yang cukup signifikan. Pada teori ini organisasi akan cenderung untuk mencari cara baru yang lebih efisien dalam melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Selain itu, organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari sumberdaya, peraturan, dan sistem yang menyediakan produk atau layanan. Pada akhirnya organisasi akan menghasilkan kekuasaan, kesejahteraan, dan legitimasi (Dimaggio & Powell, 1983).

Akuntabilitas

Terminologi akuntabilitas dapat diungkapkan definisinya dalam berbagai sudut pandang sehingga sering terjadi perubahan yang setara dengan latar belakang/kondisi masing-masing (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Dalam bidang organisasi sektor publik, akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk menjelaskan yang logis dan tepat terkait tentang asal usul dan alokasi sumber daya kepada publik. Akutabilitas dalam kondisi saat ini berhubungan dengan pengamatan dan juga pengendalian perilaku pemerintah, *defensive* pembangunan, sentralisasi kekuasaan, serta meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan efektivitas administrasi publik (Iyoha & Oyerinde, 2010).

Ada dua jenis akuntabilitas dalam sistem pemerintahan konstitusional yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal ialah model akuntabilitas secara langsung dari segi pelaporan yang dilakukan oleh tingkat bawahan pada tingkat atasan yang memegang kekuasaan. Sedangkan akuntabilitas eksternal adalah model akuntabilitas secara tidak langsung yang implikasi pelaporannya pada pihak di luar organisasi (Akbar *et al.*, 2012).

Transparansi

Transparansi merupakan upaya yang dilakukan secara sadar (sengaja) untuk memberikan seluruh informasi yang dapat dipublikasikan secara sah/legal baik positif ataupun negatif dengan akuntabel, *on time*, selaras, dan eksplisit. Transparansi bertujuan untuk menambah kapasitas daya pikir logis masyarakat luas dan menjaga

tanggung jawab organisasi terkait dengan aktivitas, kebijakan, dan aplikasinya (Ridha & Basuki, 2012). Peraturan terkait dengan transparansi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mengatur mengenai pengelolaan informasi publik pada badan publik (Muhtar, Putro & Sutaryo, 2017). Transparansi yang diterapkan pada organisasi sektor publik diharapkan mampu menurunkan informasi asimetris antara pihak di dalam organisasi (manajemen) dan pihak di luar organisasi (masyarakat) (Ridha & Basuki, 2012).

Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen dapat dikatakan sebagai tingkat emosional yang berhubungan erat dengan loyalitas pada setiap individu pada anggota kelompok untuk memberikan gagasan, ide dan responsibilitas dalam rangka mencapai visi, misi, dan *value* organisasi (Primarisanti & Akbar, 2015). Terwujudkan organisasi yang akuntabel dan transparan apabila memiliki *support* dan komitmen yang kuat dari seluruh anggota baik dari tingkat bawah, tingkat menengah maupun tingkat atas. Sholihin & Pike (2009) menjelaskan bahwa komitmen manajemen atau organisasi mempunyai karakteristik yang penting yaitu adanya keyakinan yang kuat terkait penerimaan *value* dan tujuan organisasi, serta suatu kemauan yang tangguh untuk menjalankan kegiatan sebagai bagian organisasi.

Regulasi

Menurut Bastian (2010) regulasi publik ialah suatu ketetapan yang telah ditentukan yang harus dijalankan dan ditaati oleh organisasi publik dalam melaksanakan setiap aktivitas pengelolaan organisasinya. Regulasi publik berlaku untuk organisasi pusat dan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan, ataupun organisasi sosial lainnya.

Teori kelembagaan menjelaskan bahwa organisasi memiliki faktor yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi reformasi di instansi pemerintah yaitu regulasi (atau mandat dewan legislatif) (Brignall & Modell, 2000). Akuntabilitas internal dan eksternal terhadap mandat dewan legislatif memiliki hubungan yang positif (Akbar *et al.*, 2012). Dalam organisasi sektor publik di Indonesia, regulasi atau peraturan memiliki keterkaitan dengan mandat dewan legislatif. Seluruh organisasi pemerintah berkewajiban untuk mengikuti setiap peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dalam konteks ini regulasi bersifat memaksa setiap organisasi agar mematuhi dan mengimplementasikannya (Ahyaruddin & Akbar, 2017).

Pengembangan Hipotesis

Komitmen manajemen dapat dikatakan sebagai tingkat emosional yang berhubungan erat dengan loyalitas individu atau anggota kelompok untuk mencurahkan gagasan, perhatian, dan ide guna mencapai tujuan organisasi (Primarisanti & Akbar, 2015). Terwujudnya organisasi yang akuntabel dan transparan apabila memiliki *support* dan komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dari semua level baik bawah maupun atas. Anggota organisasi yang memiliki komitmen manajemen seharusnya mempunyai keyakinan dan kemauan menjalankan pekerjaannya untuk organisasi (Porter, Steers & Mowday, 1974; Sholihin & Pike, 2009).

Hasil dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa komitmen manajemen mampu mendorong organisasi mencapai akuntabilitas dan transparansi. Cavalluzzo & KIttner (2004) merumuskan bahwa komitmen manajemen akan berdampak pada akuntabilitas kinerja. Sementara itu, riset lain oleh Akbar *et al.* (2012) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berdampak pada akuntabilitas baik akuntabilitas internal maupun ekternal. Hasil yang sama dikemukakan oleh Primarisanti & Akbar (2015) yang menjelaskan bahwa komitmen manajemen berpengaruh pada akuntabilitas organisasi. Ridha & Basuki (2012); Pramita & Khikmah (2016) juga menyatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H1a: Komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap transparansi

H1b: Komitmen manajemen berpengaruh

signifikan terhadap akuntabilitas

Teori kelembagaan mengungkapkan bahwa regulasi (atau mandat dewan legislatif) merupakan faktor penting bagi pemerintah dalam melakukan reformasi (Brignall & Modell, 2000). Dalam organisasi sektor publik di Indonesia, regulasi atau peraturan memiliki keterkaitan dengan mandat dewan legislatif. Akuntabilitas internal dan eksternal terhadap mandat dewan legislatif memiliki hubungan yang positif (Akbar *et al*., 2012).

Landasan dasar aparat pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya dapat dikatakan sebagai regulasi atau peraturan yang memiliki dampak pada akuntabilitas dan kinerja pemerintah (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Penelitian lain mengungkapkan bahwa regulasi atau peraturan sebagai salah satu nilai utama dalam pemrakarsa suatu perubahan (Talbot & Business, 2008). Pemerintah telah diwajibkan untuk memberikan keterbukaan informasi pada publik agar tercipta transparansi informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan negara oleh pemerintah (Nurdiansyah, 2016). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah atau regulasi dapat dianggap sebagai salah satu bagian penting untuk keberhasilan perubahan terkait dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi instansi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pertanyaan berikutnya yaitu apakah regulasi akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas? Sehinga dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2a: Regulasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi

H2b: Regulasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

Stiglitz (1999) mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas sebagai hak yang mendarah daging pada setiap manusia. Tranparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good governance* yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, kedua prinsip ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain sehingga sangat sulit untuk dipisahkan (Rigian & Sari, 2019). Apabila transparansi dan akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewajiban pemerintah dan hak yang harus diperoleh masyarakat luas maka akan memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi akan mendorong pemerintah untuk berkinerja semakin baik. Adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan secara baik oleh instansi pemerintah maka keadilan pada pelayanan sektor publik dapat dicapai (Pratolo, 2008). Oleh karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah transparansi akan berdampak pada akuntabilitas? Sehingga diajukan hipotesis berikut:

H3: Transparansi berhubungan signifikan terhadap akuntabilitas

METODE PENELITIAN

Data dan sampel

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini memperbaiki metode dari beberapa riset sebelumnya yaitu Noprizal *et al*. (2017); Pramita & Khikmah (2016); Ridha & Basuki (2012); Sihaloho & Supriono, (2013) dengan memperluas obyek dan memperbesar sampel penelitian karena ukuran sampel berpengaruh pada generalisasi hasil penelitian (Cherkassy *et al*., 1999). Penelitian ini menguji pengaruh antarvariabel secara simultan menggunakan model struktural (*Structural Equation Model*) dengan *Partial Least Square* (PLS). Analisis struktural digunakan untuk memperbaiki kelemahan pada data termasuk adanya multikoleniaritas sehingga dapat memperlihatkan hubungan antarvariabel secara nyata (Hartono, 2011).

Populasi penelitian ini yaitu pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada setiap kabupaten/kota yang mencakup Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Total SKPD dalam penelitian ini sebanyak 135 SKPD di DIY karena keterbatasan jumlah responden yang tidak diketahui sehingga jumlah kuesioner yang disebar sesuai dengan permintaan di setiap SKPD dengan total kuesioner yang tersebar sebanyak 250 kuesioner. Setelah beberapa waktu kuesioner yang kembali hanya sebanyak 175 kuesioner dan hanya 120 kuesioner yang

dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan data primer dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu (Budiarto, 2019). Kriteria yang digunakan adalah Pertama, Pegawai dengan tingkat pendidikan minimal SMA. Kedua, Pejabat eselon II sampai IV, Ketiga, Pengalaman kerja diposisi saat ini minimal 1 (satu) tahun.

Pejabat eselon II sampai IV yang telah bekerja/menjabat selama 1 (satu) tahun atau lebih di SKPD sehingga dipandang lebih memiliki pengetahuan terhadap iklim serta kondisi yang ada pada lingkungan di SKPD serta dapat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan keputusan dan kesimpulan.

Definisi Operasi dan Pengukuran Variabel

Akuntabilitas merupakan suatu pemberian informasi pengungkapan (*disclosure)* atas kegiatan keuangan sehingga pelaporan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan mendapatkan kepercayaan. Akuntabilitas pemerintah daerah merupakan bentuk keberhasilan maupun kegagalan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Ichlas, Basri, & Arfan, 2014).

Menurut Akbar *et al.* (2012) akuntabilitas dibagi menjadi dua jenis yaitu akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Akuntabilitas internal ialah model akuntabilitas secara langsung dari segi pelaporan yang dilakukan oleh tingkat bawahan pada tingkat atasan yang memegang kekuasaan. Pengukuran akuntabilitas internal menggunakan 3 indikator yaitu Tingkat tanggung jawab atas hasil kegiatan, Menerima pengakuan positif untuk membantu pemerintahan daerah mencapai tujuan strategis dan Laporan individu berkaitan dengan laporan ulasan secara berkala pada hasil kegiatan.

Akuntabilitas eksternal ialah model akuntabilitas secara tidak langsung yang implikasi laporannya pada pihak di luar organisasi. Pengukuran akuntabilitas eksternal menggunakan 8 indikator yang terdapat dalam Akbar *et al.* (2012).

Transparansi merupakan konsep yang cukup luas yang memiliki hubungan dengan tersedianya informasi, mudah dan dapat diakses dengan baik, dan selalu dapat digunakan kapanpun oleh *stakeholder* (Filipe, Esteves, & Tejedo-romero, 2016). Pengukuran transparansi diukur dengan menggunakan 5 indikator menurut Ridha & Basuki (2012) yang terdiri dari: Menyampaikan informasi positif dalam laporan keuangan, Menyampaikan informasi negatif dalam laporan keuangan, Laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, Informasi keuangan mengenai *input*, *output* dan *outcome* secara terbuka dan akses kepada pemangku kepentingan.

Komitmen manajemen merupakan tingkat emosional yang berhubungan erat dengan loyalitas individu untuk membantu organisasi mencapai tujuan (Primarisanti & Akbar, 2015). Pengukuran komitmen manajemen menggunakan 4 indikator menurut Nurkhamid (2008) adalah Pertama, Komitmen organisasi dalam menggunakan sumber daya yaitu anggota organisasi dan sumber daya finansial. Kedua, Adanya staf yang bertugas melakukan evaluasi pada kinerja dan program organisasi. Ketiga, memperoleh data yang relevan. Keempat, memperoleh data yang reliabel untuk menilai kinerja organisasi.

Teori kelembagaan organisasi memiliki faktor yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi reformasi di instansi pemerintah yaitu regulasi atau mandat dewan legislatif (Brignall & Modell, 2000). Indikator yang digunakan untuk mengukur mandat legislatif/regulasi menurut Akbar *et al.* (2012) yaitu keterlibatan dalam upaya pemerintahan daerah menerapkan LAKIP dan keterlibatan staf dalam upaya pemerintah daerah menerapkan LAKIP.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan dengan survei yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden. Penelitian ini dilakukan pada SKPD kabupaten/kota di DIY. Jumlah responden yang ada sebanyak 120 responden yang mencakup pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV dari lima kabupaten/kota di DIY. Gambaran secara rinci untuk 120 kuesioner yang terkumpul dapat dilihat pada Tabel 1.

Gambar 1 merupakan hasil analisis *outer* model yang menunjukkan bahwa sebanyak 24 instrumen pengukuran dari keseluruhan variabel memiliki nilai ≥ 0.5 maka instrumen pengukuran yang digunakan dinyatakan valid.

Uji kualitas model pengukuran dilakukan dengan menggunakan uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Sebuah indikator akan memenuhi validitas konvergen jika indikator memiliki nilai *outer loading* > 0.5 sehingga seluruh instrumen dapat dinyatakan valid dan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut (Tabel 2, 3, 4, 5 terlampir).

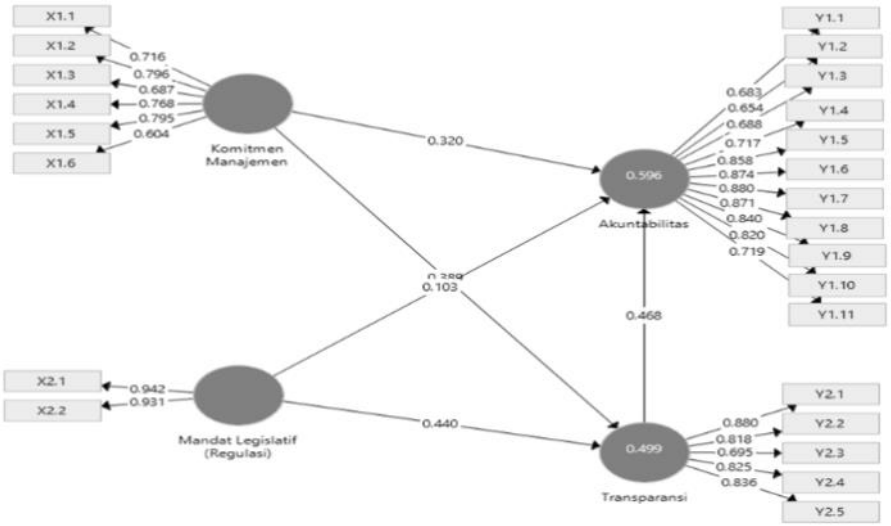

Gambar 1.
Output Analisis Model Smart PLS

Tabel 1.
Deskripsi Responden

		Daerah					Total
		Sleman	**Yogyakarta**	**Bantul**	**Gunung Kidul**	**Kulon Progo**	
Jumlah SKPD		35	24	23	20	18	120
Jenis Kelamin	Laki-laki	18	10	16	9	10	63
	Perempuan	17	14	7	11	8	57
Total		35	24	23	20	18	120
Jabatan	Eselon II	3	-	-	-	2	5
	Eselon II	9	3	6	8	9	35
	Eselon IV	23	21	17	12	7	80
Total		35	24	23	20	18	120
Kelompok Umur	<30	-	-	-	-	1	1
	30-40	4	7	2	3	2	18
	41-50	17	12	14	10	6	59
	>50	14	5	7	7	9	42
Total		35	24	23	20	18	120
Tingkat Pendidikan	Diploma	2	1	1	2	-	6
	Sarjana	19	11	13	11	7	61
	Master	14	12	9	7	11	53
Total		35	24	23	20	18	120
Jurusan Pendidikan	Akuntansi	4	3	3	2	-	12
	Lainnya	31	21	20	18	18	108
Total		35	24	23	20	18	120
Pengalaman Kerja di posisi saat ini	<2	12	6	8	7	9	42
	2-5	11	11	7	4	6	39
	6-10	6	4	5	4	2	21
	11-15	1	1	2	4	-	8
	>15	5	2	1	1	1	10
Total		35	24	23	20	18	120

Tabel 6 menunjukkan hasil uji validitas diskriminan yang dapat dilihat dengan menggunakan nilai *cross loading*. Nilai *cross loading* yang lebih besar pada variabel target menunjukkan bahwa variabel tersebut valid. Tabel 7 menunjukkan uji reliabilitas menggunakan *cronbach' alpha* dengan nilai ≥ 0.7, *composite reliability* dengan nilai ≥ 0.7, dan pengujian validitas menggunakan *AVE (Average Variance Extracted*) dengan nilai ≥ 0.5. Uji model struktural (*inner model*) dapat dilihat dengan menggunakan koefisien determinasi. Tabel 8 menunjukkan hasil R *square* untuk persamaan transparansi dan akuntabilitas.

Pengujian hipotesis yaitu pengaruh komitmen manajemen dan mandat legislatif terhadap transparansi dan akuntabilitas menggunakan teknik *bootsrapping*. Hasil analisis teknik *bootstrapping* dinyatakan diterima apabila tingkat signifikan (*p value*) < 5% dan nilai t statistik > 1.96.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1a) dapat dibuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Ridha & Basuki (2012) yang mengemukakan bahwa komitmen manajemen yang kuat akan dapat meningkatkan transparansi pelaporan keuangan yang ada di dalam organisasi

Tabel 6.
Nilai *Cross Loading*

Variabel	Indikator	Komitmen Manajemen	Mandat Legislatif	Akuntabilitas	Transparansi
Komitmen manajemen	X1.1	**0.716**	0.370	0.474	0.417
	X1.2	**0.796**	0.359	0.480	0.537
	X1.3	**0.687**	0.161	0.414	0.345
	X1.4	**0.768**	0.231	0.374	0.355
	X1.5	**0.795**	0.451	0.612	0.532
	X1.6	**0.604**	0.342	0.395	0.313
Mandat legislatif	X2.1	0.429	**0.942**	0.516	0.601
	X2.2	0.415	**0.931**	0.484	0.550
Transparansi	Y1.1	0.544	0.505	**0.683**	0.573
	Y1.2	0.561	0.331	**0.654**	0.482
	Y1.3	0.546	0.321	**0.688**	0.526
	Y1.4	0.357	0.446	**0.717**	0.541
	Y1.5	0.474	0.553	**0.858**	0.637
	Y1.6	0.474	0.500	**0.874**	0.569
	Y1.7	0.460	0.470	**0.880**	0.606
	Y1.8	0.530	0.504	**0.871**	0.661
	Y1.9	0.596	0.330	**0.840**	0.597
	Y1.10	0.556	0.370	**0.820**	0.529
	Y1.11	0.430	0.248	**0.719**	0.439
Akuntabilitas	Y2.1	0.602	0.579	0.632	**0.880**
	Y2.2	0.424	0.514	0.660	**0.818**
	Y2.3	0.409	0.458	0.449	**0.695**
	Y2.4	0.496	0.448	0.521	**0.825**
	Y2.5	0.442	0.490	0.634	**0.836**

Tabel 7.
Construct Reability and Validity

	Cronbach's Alpha	***Rho_A***	***Composite Reliability***	***AVE***
Komitmen Manajemen	0.825	0.842	0.872	0.534
Mandat Legislatif	0.860	0.864	0.935	0.877
Akuntabilitas	0.937	0.940	0.946	0.619
Transparansi	0.871	0.881	0.907	0.661

guna mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan organisasi. Semakin tinggi komitmen anggota organisasi maka informasi akan lebih terbuka dan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik (Pradita, Hartono & Firdausi, 2019).

Hasil analisis pada hipotesis pertama (H1b) membuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Organisasi yang memiliki komitmen manajemen, baik dari pimpinan maupun bawahan akan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik sehingga akuntabilitas organisasi akan terjamin. Komitmen manajemen merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Seperti implementasi *new public managemen*t (NPM) pada instansi pemerintah. Pemerintah meyakini bahwa NPM akan meningkatkan efisiensi dan mempercepat respon kepada masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas (Primarisanti & Akbar 2015; Ahyaruddin & Akbar, 2017).

Hasil pengujian hipotesis kedua (H2a) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh regulasi terhadap transparansi. Febriananingsih (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa regulasi dalam bentuk UU KIP dapat mendukung transparansi pada instansi pemerintah. Pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada di instansi pemerintah dapat mendorong terwujudnya transparansi. Tranparansi pelaporan yang dilakukan oleh SKPD harus dapat mencerminkan seluruh informasi yang dipublikasikan secara sah secara hukum baik itu positif atau bahkan negatif. Transparansi juga mencakup informasi yang tepat waktu agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat luas dan sebagai responsibilitas SKPD atas segala aktivitas dalam melayani masyarakat (Ridha & Basuki, 2012).

Pengujian hipotesis kedua (H2b) menunjukkan bahwa regulasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas. Adanya regulasi dapat mengakibatkan munculnya implementasi berbagai kebijakan di organisasi yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legimitasi. Seluruh organisasi pemerintah berkewajiban untuk mentaati setiap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam konteks ini regulasi bersifat mengharuskan/ memaksa setiap organisasi agar mematuhi dan melaksanakannya (Ahyaruddin & Akbar, 2017). Hasil pengujian rata-rata sampel pada Tabel 9 juga menunjukkan bahwa variabel regulasi memiliki nilai paling rendah. Hasil ini membuktikan bahwa keterlibatan dalam penyusunan LAKIP yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur akuntabilitas masih belum optimal. Akuntabilitas pada organisasi pemerintah masih belum nyata karena regulasi yang ada hanya digunakan untuk kepentingan formal. Laporan akuntabilitas yang disajikan oleh pemerintah daerah hanya sebagai alat menggugurkan kewajiban sehingga masih bersifat semu (Nurkhamid 2008).

Pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan mempengaruhi. Tanpa transparansi maka akuntabilitas akan sulit ter-

Tabel 8.
Nilai R Square

Model Persamaan	*R Square*	*Adj R Square*
Akuntabilitas	0.596	0.585
Transparansi	0.499	0.490

Tabel 9.
Pengujian Hipotesis

	Original Sample	*Sample Mean*	*S. Dev.*	*t Statistic*	*P Value*
Komitmen Manajemen → Transparansi	0.389	0.394	0.091	4.272	0.000**
Komitmen Manajemen → Akuntabilitas	0.320	0.333	0.090	3.566	0.000**
Regulasi → Transparansi	0.440	0.442	0.087	5.028	0.000**
Regulasi → Akuntabilitas	0.103	0.103	0.094	1.089	0.277
Transaparansi→ Akuntabilitas	0.468	0.461	0.093	5.024	0.000**

wujud (www.undp.org). Dengan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan secara nyata maka pemerataan dan keadilan pada pelayanan sektor publik dapat tercapai (Pratolo, 2008). Lebih jauh Akbar (2018) menjelaskan bahwa berkaitan dengan pengukuran kinerja dan akuntabilitas, pengelolaan organisasi sektor publik harus dilakukan dengan optimal dan transparan sehingga efektivitas layanan pada masyakarat dapat terwujud.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi. Regulasi berpengaruh signifikan terhadap transparansi, namun tidak berpengaruh pada akuntabilitas.

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini hanya mencakup pada organisasi sektor publik di DIY yang membatasi ruang lingkup pada dinas dan badan di SKPD. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dan populasi tidak hanya terbatas dalam satu lingkup SKPD tetapi juga pada organisasi sektor publik lainnya yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat luas seperti puskesmas, rumah sakit, dan instansi pendidikan, karena semakin banyak sampel maka semakin baik hasil penelitian (Alwi, 2015). Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan berbagai pengertian dimensi akuntabilitas, yang diutarakan dalam penelitian (Sinclair, 1995).

DAFTAR PUSTAKA

Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2016). The relationship between the use of a performance measurement system, organizational factors, accountability, and the performance of public sector organizations. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(1), 1–21.

Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: Semu atau nyata ? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21 (2), 106–116.

Akbar, R. (2018). Pengukuran kinerja dan akuntabilitas publik di Indonesia studi awal di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik*, 1, 1–16.

Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: The case of local government. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 262-291.

Alwi, I. (2015). Kriteria empirik dalam menentukan ukuran sampel pada pengujian hipotesis statistika dan analisis butir. *Jurnal Formatik*, 2(2), 140–148.

Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik* (3rd ed.). Jakarta.

Brignall, S., & Modell, S. (2000). An institutional perspective on performance measurement and management in the "new public sector." *Management Accounting Research*, 11, 281–306.

Budiarto, D.S. (2019). *Panduan riset kuantitatif* (1st ed.). Yogyakarta: In UPY Press.

Budiarto, D.S., & Indarti, L. (2019) Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? Riset pada kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 19-31.

Cavalluzzo, K.S., & KIttner, C.D. (2004). Implementing performance measurement innovations: evidence from governmen. *University of Pennsylvania ScholarlyCommons*, 29(3-4), 243–267.

Cherkassky, V., Shao, X., Mulier, F.M., & Vapnik, V.V (1999) Model complexity control for regression using VC generalization bounds. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 10(5), 1075-1089

Demirag, I., & Khadaroo, I. (2011). Accountability and value for money: A theoretical framework for the relationship in public–private partnerships. *Journal of Management and Governance*, 15(2), 271–296.

Dimaggio, P.J., & Powell, W.W. (1983). The iron cage revisite: Institusional isomorphim and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.

Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan informasi publik dalam pemerintah terbuka menuju tata pemerintahan yang baik. *Rechts Vinding*, 1(1), 135–156.

Filipe, J., Araujo Esteves, F., & Tejedoromero, F. (2016). Women's political representation and transparency in local governance. *Local Government Studies*, 39(30), 2–22.

Hartono, J.M. (2011) *Konsep dan Aplikasi*

Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,

Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018) Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pelayanan publik (Survei pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 21-29

Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. (2014). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pasca Sarjana Unsyiah*, 3(4), 76–84.

Iyoha, F.O., & Oyerinde, D. (2010). Accounting infrastructure and accountability in the management of public expenditure in developing countries: A focus on Nigeria. *Critical Perspectives on Accounting*, 21(5), 361–373.

Masyhur, M., Haerdi, & Silfi, A. (2011). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesbilitas laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 1179–1192.

Muhtar, Putro, D. A., & Sutaryo. (2017). Penentu transparansi pemerintah daerah: Sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(2), 142–156.

Noprizal, R., Rusli Tanjung, A., & Hariyani, E. (2017). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpatian lingkungan, komitmen manajemen dan sistem pengendalian pemerintah terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Online Mahasiswa*, 4(1), 1066–1079.

Novatiani, A., Kusumah, R.W.R., & Vebiani, D.P. (2019) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 51-61.

Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147–151.

Nurkhamid, M. (2008). Implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 3(1), 45–75.

Porter, L. W., Steers, R. M., & Mowday, R.T. (1974). Organization commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. *Jurnal of Applied Psychology*, 59(5), 603–609.

Pradita, D.K., Hartono, A., & Firdausi, M.A. (2019). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemene dan Akuntansi*, 3(2), 87–100.

Pramita, Y.D., & Khikmah, S.N. (2016). Pengaruh tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan. *Syariah Paper Accounting*, 381–393.

Pratolo, S. (2008). Transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan perwujudan keadilan dan kinerja pemerintah daerah: Sudut pandang aparatur masyarakat di era otonomi daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 9(2), 108–124.

Primarisanti, H., & Akbar, R. (2015). Factors influencing the success of performance measurement: evidence from local goverment. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 30(1), 56–71.

Ridha, M.A., & Basuki, H. (2012). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manage-men terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *Tesis*, 1–28.

Rigian, D., & Sari, R.P. (2019) Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap kinerja anggaran berbasis value for money. *Journal of Business and Information System*s, 1 (1), 38-47.

Ritonga, I.T., & Syahrir, S. (2017). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.

Sholihin, M., & Pike, R. (2009). Behavioural consequences fairness in performance evaluation and its behavioural consequences. *Accounting and Business Research*, 39, 37–41.

Sihaloho, J., & Supriono, R.A.S.S. (2013). Pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1–15.

Sinclair, A. (1995). The chameleon of ac-

countability: Forms and discourses. *Accounting Organizations and Society*, 20(2), 219–237.

Stiglitz, J. E. (1999). *On liberty, the right to know, and public discourse: The role of transparency in public life*. Oxford Amnesty Lecture, 1–31.

Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019) pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM*, 2(1), 52-66.

Susanto, D., Anggraeni, Y.D., & Rachmawati, Y. (2015). Pengaruh good governance terhadap kualitas pemberian layanan publik. *Jurnal Paradigma*, 12(02), 73–91.

Talbot, C., & Business, M. (2008). Performance regimes the institutional context of performance policies. *Internasional Journal of Public Administration*, 31(14), 1569–1591.

Wahyuni, S. (2015) Implementasi akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih. *e-Jurnal Katalogis*, 3(11), 173-179.

Yusrianti, H., & Safitri, H.R. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 13(4), 546–558.

LAMPIRAN

Tabel 2.
Nilai *Outer Loading* Komitmen Manajemen

No	Pertanyaan	*Outer Loading*
1.	Atasan memiliki komitmen untuk keberhasilan suatu kegiatan	0.716
2.	Atasan mencurahkan semua sumber daya untuk mengukur kinerja	0.796
3.	Atasan memberikan tugas bawahan untuk mengevaluasi setiap kegiatan	0.687
4.	Atasan memberikan tugas pada unit keja untuk mengevaluasi setiap kegiatan	0.768
5.	Organisasi memiliki data akurat dan dapat dipercaya yang bisa digunakan untuk pengukuran kinerja	0.795
6.	Organisasi memakai kriteria/pembanding yang sesuai guna menganalisis kinerja organisasi	0.604

Tabel 3.
Nilai *Outer Loading* Mandat Legislatif (Regulasi)

No	Pertanyaan	*Outer Loading*
1.	Saya terlibat dalam upaya menerapkan LAKIP	0.942
2.	Staf saya terlibat dalam upaya menerapkan LAKIP	0.931

Tabel 4.
Nilai *Outer Loading* Akuntabilitas

No.	Pernyataan	*Outer Loading*
Akuntabilitas Internal		
1.	Atasan dan bawahan selalu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan	0.683
2.	Staf menerima pujian atas keberhasilan mencapai tujuan organisasi	0.654
3.	Atasan dan bawahan berperan dalam menilai keberhasilan program	0.688
Akuntabilitas eksternal		
Organisasi (SKPD) menginformasikan kepada masyarakat, pejabat terpilih (anggota DPRD), maupun kelompok bisnis/swasta mengenai …...		
4.	Prioritas program atau kegiatan	0.717
5.	Tujuan dan sasaran program	0.858
6.	Manfaat kegiatan	0.874
7.	Ukuran-ukuran output program	0.880
8.	Ukuran-ukuran hasil *(outcome)* program	0.871
9.	Informasi keberhaasilan dan penjelasan kegiatan	0.840
10.	Rekam jejak ukuran keberhasilan	0.820
11.	*Benchmaking* untuk ukuran keberhasilan	0.719

Tabel 5.
Nilai *Outer Loading* Transparansi

No.	Pernyataan	*Outer Loading*
1.	Memberikan informasi kesuksesan organisasi pada laporan keuangan	0.880
2.	Memberikan informasi tentang kegagalan organisasi dalam laporan keuangan	0.818
3.	Menyajikan laporan keuangan yang handal	0.695
4.	Menyajikan informasi finansial yang transparan tentang masukan dan luaran dan hasil	0.825
5.	Memberikan akses pada masyarakat atas laporan keuangan	0.836

DATA RESPONDEN:

Silakan isi atau *cheklist* pada kotak yang tersedia sesuai dengan data diri Bapak/Ibu/ Saudara/i Responden.

Kabupaten/Kota : □ Sleman □ Yogyakarta □ Bantul
□ Gunungkidul □ Kulon Progo

Nama Instansi/SKPD : _____

Jabatan : □ Eselon II □ Eselon III □ Eselon IV

Jenis Kelamin : □ Laki-laki □ Perempuan

Umur : □ ≤ 30 □ 31 – 40 □ 41 – 50 □ > 50

Tingkat Pendidikan : □ SMA □ Diploma □ Sarjana
□ Master □ Doktor

Jurusan Pendidikan : □ Akuntansi
□ Lainnya (sebutkan) : _____

Pengalaman Kerja di Pemerintahan : □ < 2 □ 2 – 5 □ 6 – 10 □ 11 – 15 □ > 15

Pengalaman Kerja di posisi saat ini : □ < 2 □ 2 – 5 □ 6 – 10 □ 11 – 15 □ > 15

Petunjuk Pengisian:

1. Mohon dengan hormat, bantuan, dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan dalam kuesioner ini.
2. Beri tanda centang (√) pertanyaan berikut yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya pada kolom yang tersedia.
3. Ada 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing–masing pertanyaan, yaitu:
   1. Sangat Tidak Setuju
   2. Tidak Setuju
   3. Ragu-Ragu
   4. Setuju
   5. Sangat Setuju

1. Komitmen manajemen

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Pimpinan selalu menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai hasil suatu program/kegiatan/proyek					
2	Pimpinan selalu mengalokasikan sumber daya yang ada seperti dana, SDM, dan waktu untuk digunakan dalam pengukuran kinerja					
3	Pimpinan selalu menugaskan stafnya untuk mengevaluasi programnya					
4	Pimpinan selalu menugaskan masing-masing unit kerjanya untuk mengevaluasi kinerja programnya					
5	Organisasi selalu mengumpulkan data yang akurat dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengukuran kinerja					
6	Organisasi selalu menggunakan kriteria atau pembanding *(benchmark)* yang tepat untuk mengevaluasi kinerja organisasi					

2. Mandat Legislatif (Regulasi)

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya terlibat dalam upaya pemerintah daerah menerapkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)					
2	Staf saya terlibat dalam upaya pemerintah daerah menerapkan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)					

3. Akuntabilitas

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
Akuntabilitas Internal						
1	Pimpinan dan staf selalu mempertanggungjawabkan *(accountable)* hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan					
2	Pegawai/karyawan selalu menerima pengakuan positif atas perannya dalam pencapaian tujuan strategis organisasi					
3	Pimpinan dan staf selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan/proyek					
Akuntabilitas eksternal						
Organisasi (SKPD) menginformasikan kepada masyarakat, pejabat terpilih (anggota DPRD), maupun kelompok bisnis/swasta mengenai....						
4	Prioritas kebijakan/tujuan umum organisasi					
5	Tujuan dan sasaran program					
6	Fungsi dan kegiatan program					
7	Ukuran-ukuran output program					
8	Ukuran-ukuran hasil *(outcome)* program					
9	Informasi kinerja narasi program					
10	Tren dari ukuran-ukuran kinerja					
11	Perbandingan ukuran-ukuran kinerja					

4. Transparansi

Anda telah menyusun laporan keuangan, seluas mana Anda menerapkan transparansi pelaporan keuangan?

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Menyampaikan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SKPD dalam laporan keuangan					
2	Menyampaikan informasi mengenai ketidakberhasilan pencapaian SKPD dalam laporan keuangan					
3	Menyediakan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu					
4	Menyediakan informasi keuangan mengenai *input, output*, dan *outcome* secara terbuka					
5	Menyediakan akses kepada pemangku kepentingan atas laporan keuangan					